

Angkatan Kerja Dan Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran

Adriyanto, Didi Prasetyo, Rosmiyati Khodijah

Universitas Sriwijaya

email: Adriyanto240@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini merupakan kajian jumlah angkatan kerja dan pengangguran yang bertujuan untuk mengetahui hubungan ketenagakerjaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lainnya yakni penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja meskipun permintaan sangat tinggi sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Upah Minimum juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Diharapkan Pemerintah berkomitmen untuk memperbanyak pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak untuk mengurangi angka pengangguran yang berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan.

Kata kunci : Angkatan Kerja; Permintaan Tenaga kerja; Pengangguran.

ABSTRACT

This writing is a study of the number of labor force and unemployment which aims to see the employment relationship and the factors that affect the unemployment rate. The method used is descriptive qualitative. The results show that potentially, Indonesia has human resource capabilities to be developed and in other parties are faced problems of manpower fields. The development of the number of labor force is rapid but not followed by sufficient employment opportunities. Another obstacle is the supply of labor that is not in accordance with the needs or certain qualifications demanded by the labor market even though the demand is very high, which causes higher unemployment. The minimum wage also greatly affects the unemployment rate. The wages set by the government greatly affect the existing unemployment rate. Any increase in the wage rate will be followed by a fall in the workforce that follows, which means unemployment. It is hoped that the Government's commitment to increase the opening of new jobs that can absorb a large number of workers to reduce the unemployment rate which has implications for signs of the poverty rate.

Keywords; Labor force; Labor demand; Unemployment.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat menyebabkan bertambahnya kebutuhan ekonomi setiap orang. Semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada sehingga jumlah pengangguran bertambah.

Karena pengangguran terjadi disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda [1]. Penduduk merupakan sumber penawaran tenaga kerja namun tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya masalah tenaga kerja yang sangat kompleks dan besar termasuk juga pada tingkatan kabupaten. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami menjadi besar karena menyangkut ribuan bahkan jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah mudah dan sederhana karena disamping mendasarkan pada jumlah angka tenaga kerja di masa lampau, harus diketahui pula prospek produksi di masa yang akan datang [2]. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah di bidang ekonomi dan sosial, yaitu pengangguran dan kemiskinan di mana jumlah penduduk yang terlalu besar tetapi tidak bisa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengangguran dan kemiskinan juga merupakan masalah ekonomi yang kompleks dan sulit untuk diatasi serta perlu dicarikan solusi yang tepat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, diantaranya pertumbuhan ekonomi [3], tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah [4] yang dapat berakibat buruk terhadap stabilitas perekonomian, politik, dan sosial.

Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks di dalam suatu daerah, karena pengangguran bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun juga menyerang masyarakat yang memiliki latar pendidikan yang tinggi. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan sarjana yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun, terlebih lagi beberapa pakar ekonomi memperkirakan pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan [5]. Tingkat pengangguran kelompok muda yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *Pertama*, faktor struktural. Faktor ini terdiri dari kurangnya keterampilan kelompok muda dibanding kelompok yang lebih matang, ketimpangan atau kendala geografis dan kelangkaan informasi yang menghambat pasar kerja, dan faktor usia ketika meninggalkan sekolah, biasanya meninggalkan sekolah pada usia lebih awal mengalami tingkat pengangguran yang lebih

tinggi. *Kedua*, faktor non struktural yang terdiri dari kenaikan tingkat upah buruh yang mendorong pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak menerima karyawan baru, meningkatnya partisipasi perempuan termasuk mereka yang berstatus kawin kedalam angkatan kerja, persepsi pemuda terhadap tingkat upah yang masih rendah, serta persepsi karir maupun lingkungan kerjanya [6].

Menurut data yang diperoleh dari BPS jumlah pengangguran terbanyak selalu diduduki oleh jenjang SMA ke atas, ini berarti pengangguran terbuka selalu menjadi masalah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Musi Banyuasin diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun masih mengalami fluktuatif, adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2018

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin			
	2015	2016	2017	2018
Laki - Laki	6.07	5.70	5.53	5.40
Perempuan	6.37	5.45	5.44	5.26

Sumber : BPS [7]

Berdasarkan tabel 1, tingkat pengangguran terbuka penduduk di Indonesia berdasarkan jenis kelamin mengalami fluktuatif, banyak faktor yang meningkatkan pengangguran pada masyarakat, salah satunya faktor perubahan angkatan kerja dan upah. Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional, maka menimbulkan kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemampuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian [8].

Angkatan kerja di Indonesia dapat dikatakan sangat besar, namun dengan lapangan kerja yang terbatas, tingkat partisipasi kerja menurun dan struktur pasar tenaga kerja berubah relatif cepat. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran di negara kita menjadi semakin tinggi. Adapun data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan

kerja menurut Kelompok Umur tahun 2015-2018 dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015-2018 adalah :

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur - UB	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur			
	2015	2016	2017	2018
15-19	17.71	28.09	27.54	26.67
20-24	12.86	15.80	16.62	16.73
25-29	10.65	7.08	6.76	6.99
30-34	8.86	3.63	3.40	3.47
35-39	7.86	2.21	2.45	2.49
40-44	7.59	2.05	1.86	1.81
45-49	6.97	1.35	1.51	1.58
50-54	5.93	1.66	1.54	1.40
55-59	6.05	1.55	1.73	1.25
60 keatas	4.74	1.51	1.52	0.61

Sumber: BPS [7]

Tabel 3. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2017 - 2019

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2017		2018		2019
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	92.331	62.984	42.039	31.774	35.655
2	Tidak/belum tamat SD	546.897	404.435	446.812	326.962	435.655
3	SD	1.292.234	904.561	967.630	898.145	954.010
4	SLTP	1.281.240	1.274.417	1.249.761	1.131.214	1.219.767
5	SLTA Umum/SMU	1.552.894	1.910.829	1.650.636	1.930.320	1.680.794
6	SLTA Kejuruan/SMK	1.383.022	1.621.402	1.424.428	1.731.743	1.381.964
7	Akademi/Diploma	249.705	242.937	300.845	220.932	269.976
8	Universitas	606.939	618.758	789.113	729.601	839.019
	Total	7.005.262	7.005.262	6.871.264	7.000.691	6.816.840

Sumber: BPS [7]

Selain angkatan kerja, Upah Minimum juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran [9], upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran sehingga besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran [10]. Sebaliknya, apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Adapun data tingkat upah per jam tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4 upah minimum Per Provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sehubungan dengan data tersebut, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan

berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang artinya jumlah pengangguran akan berkurang.

Tabel 4. Upah Kerja Per Jam Tahun 2015-2018

Provinsi	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Menurut Provinsi (Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
ACEH	11107	13579	14782	13787
SUMATERA UTARA	10645	11609	13451	13299
SUMATERA BARAT	11250	13192	14501	14565
RIAU	13156	15098	15130	15499
JAMBI	12775	12862	14195	13893
SUMATERA SELATAN	11554	12794	13064	13242
BENGKULU	12103	12657	13933	14296
LAMPUNG	10040	10380	11236	11794
KEP. BANGKA BELITUNG	12541	13964	14777	15778
KEP. RIAU	18796	18595	20340	23805
DKI JAKARTA	17167	22923	23813	25443
JAWA BARAT	11149	14513	16270	16910
JAWA TENGAH	8459	9677	10608	11428
DI YOGYAKARTA	10399	11642	12301	12554
JAWA TIMUR	9229	10879	11903	12555
BANTEN	14194	21209	19675	20545
BALI	10937	14638	15559	15972
NUSA TENGGARA BARAT	8979	10628	10879	11218
NUSA TENGGARA TIMUR	11323	13037	12366	12283
KALIMANTAN BARAT	12667	13086	14725	14591
KALIMANTAN TENGAH	13953	16645	16526	17352
KALIMANTAN SELATAN	13355	14894	15408	15621
KALIMANTAN TIMUR	15816	20182	21557	21033
KALIMANTAN UTARA	16211	18858	20177	18857
SULAWESI UTARA	12647	16282	17091	16887
SULAWESI TENGAH	12282	13210	13780	13417
SULAWESI SELATAN	12513	14368	16165	15525
SULAWESI TENGGARA	13550	19484	16485	15942
GORONTALO	9958	13112	12677	11759
SULAWESI BARAT	14221	12690	12513	11909
MALUKU	14797	16332	16247	14918
MALUKU UTARA	13161	15740	15655	15840
PAPUA BARAT	17156	18926	19890	21851
PAPUA	18589	22190	25401	25819
INDONESIA	11389	13888	14764	15318

Sumber : BPS [11].

Jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan [12]. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menambah jumlah angkatan kerja. Dewasa ini banyaknya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja baru sehingga permasalahan penduduk akan menambah jumlah pengangguran. banyaknya jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang terbatas membuat masalah pengangguran menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Mengacu pada uraian-uraian dimaksud maka tulisan ini merupakan kajian

terhadap angkatan kerja dan pengangguran yang ditujukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

METODE

Metode yang digunakan penulis yaitu Deskriptif kualitatif yang ditunjang dengan kutipan buku dan artikel jurnal yang sudah dipublikasikan serta data yang disajikan adalah data angkatan kerja dan Upah per jam kerja menurut Provinsi tahun 2015-2019 dari BPS. Ruang lingkup penelitian adalah jumlah angkatan kerja dan pengangguran bertujuan untuk mengetahui hubungan ketenagakerjaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup.

Kendala lain yang merupakan kendala pokok di bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja meskipun permintaan sangat tinggi sehingga menimbulkan angka pengangguran yang semakin tinggi.

Selain kedua hal tersebut upah minimum juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada, dimana setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran.

B. Pembahasan

Studi kependudukan tenaga kerja terkenal istilah *manpower*, dimana seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif yang berumur 15 tahun keatas yang disesuaikan dengan ketentuan internasional [13]. Menurut Undang-Undang Yang Mengatur tentang ketenagakerjaan bahwa yang disebut dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja [14]. Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standar Labour Force Concept*) seperti yang digunakan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Konsep ini merupakan konsep yang disarankan dan direkomendasikan *International Labour Organization* (ILO), disebutkan bahwa penduduk dibedakan atas usia kerja dan penduduk bukan usia kerja, penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran sedangkan bukan angkatan kerja terdiri penduduk yang periode rujukan tidak mempunyai/ melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain) [15]. Undang-undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat [14].

Hal-hal yang dikemukakan tersebut mengindikasikan bahwa tenaga kerja adalah masyarakat yang sudah memasuki usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan serta yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang termasuk penduduk usia kerja atau produktif yang berusia 15-64 tahun baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan maupun sedang mempersiapkan usaha baru [4]. Banyak sedikitnya angkatan kerja tergantung pada komposisi jumlah penduduk. Apabila golongan usia kerja mengalami kenaikan maka jumlah angkatan kerja pun akan bertambah. Angkatan kerja yang banyak diharapkan akan mampu memicu peningkatan kegiatan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaannjuga tergolong dalam angkatan kerja [16]. Dalam hal ini pengertian angkatan kerja "mampu" berarti mampu secara fisik, jasmani, kemampuan mental dan juga secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan juga melakukan pekerjaan yang dilakukan dan juga bersedia secara aktif maupun juga pasif dalam melaksanakan dan mencari pekerjaan. Angkatan kerja dikategorikan menjadi dua [7], yaitu : 1). Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah angkatan kerja mempunyai ciri-ciri : a). Pada satu minggu sebelum terdapat perhitungan melaksanakan pekerjaan dalam mendapatkan atau membantu untuk memperoleh penghasilan atau dapat juga dimaknai keuntungan yang lamanya antara satu jam dalam seminggu yang lalu. b). Mereka yang seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam. Dalam hal ini misalnya pekerjaan tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sama-sama tidak masuk kerja disebabkan melakukan cuti, sakit, mogok, mangkir atau juga perusahaan melakukan penghentian aktivitasnya selama sementara. 2). Angkatan kerja yang

digolongkan menganggur dan sedang mencari pekerjaan adalah angkatan kerja yang mempunyai ciri-ciri: a). Sebelumnya belum memiliki pengalaman kerja, tetapi sedang dalam proses atau berusaha dalam mencari pekerjaan. b). Posisi bekerja, tetapi ada pencacahan menganggur dan berupaya untuk memperoleh pekerjaan. c). Mereka yang diberi kebebasan dalam bertugas dan sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian maka angkatan kerja merupakan setiap orang yang tergolong sebagai Pekerja, Penganggur dan Pencari kerja. Klasifikasi tenaga kerja yang merupakan pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan [14]. Yaitu: Berdasarkan penduduknya maka 1). Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2). Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Berdasarkan batas kerja maka 1). Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Berdasarkan kualitasnya maka 1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 2) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. United Nation (1962) mendefinisikan angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai penduduk yang memproduksi barang dan jasa secara ekonomi yang juga mencakup mereka yang tidak bekerja tapi bersedia bekerja, sedangkan yang dimaksud dengan penduduk bekerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan pekerjaan yang memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu

yang lalu. Bekerja dalam satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Permintaan tenaga Kerja (*Labor Demand*) merupakan hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk dipekerjakan dapat juga didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu (Maimun Soleh : 2007). Kurva Nilai produk marginal (VMP/Value Marginal Product) merupakan kurva permintaan tenaga kerja jangka pendek dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. VMP adalah biaya marginal dari mempekerjakan satu unit tenaga kerja dan pendapatan marginal dari satu unit input. VMP menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempekerjakan pekerja tambahan dan memegang modal konstan, dimana satu unit peningkatan tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan sebesar nilai unit penjumlahan dari satu unit tenaga kerja. Jika diberlakukan harga produk sebagai variabel eksogen tergantung pada keseimbangan pasar, maka nilai produk rata-rata meningkatkan lapangan pekerjaan (Borjas, 2013). Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada hubungan positif antara pekerjaan jangka pendek dan harga output.

Penawaran Tenaga Kerja (*Labor Supply*) merupakan jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu Analisis penawaran tenaga kerja menganggap bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga kerja maupun perubahan tingkat keterampilan. Untuk menganalisis dampak perubahan tingkat upah terhadap tenaga kerja yang ditawarkan dapat digunakan efek substitusi dan efek pendapatan. Melalui efek substitusi, perubahan upah menyebabkan perubahan pada *opportunity cost* waktu luang sehingga menghabiskan waktu luang menjadi lebih mahal yang pada akhirnya mengurangi waktu luang dan menambah jam kerja (Borjas, 2013). Seseorang melakukan penawaran kerja atas dasar keinginan individu untuk memperoleh barang dan jasa, sehingga mereka harus mengorbankan beberapa jam waktu luang yang dimiliki. Penawaran tenaga kerja merupakan hasil dari keputusan untuk bekerja tiap individu [17]. Sedangkan kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang. Pada tingkat upah di atas reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan akan berubah jika kesejahteraan sudah membaik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan slope kurva

penawaran tenaga kerja menjadi negatif, sehingga kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang atau *backward-bending labor supply curve* [17]. Dalam kondisi yang menggambarkan jika kurva penawaran tenaga kerja pada segmen miring ke atas menyiratkan bahwa efek substitusi pada awalnya lebih kuat sedangkan segmen *backward-bending* menyiratkan bahwa efek pendapatan pada akhirnya mendominasi [18].

Permasalahan yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketidak seimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) pada tingkat upah tertentu. Akan tetapi kenyataan yang sering terjadi pula adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada suatu jenis pekerjaan. Artinya pada tingkat upah tertentu, untuk suatu pekerjaan tertentu jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja lebih banyak dari jumlah yang diminta untuk dipekerjakan. Namun pada jenis pekerjaan tertentu terdapat kelebihan permintaan untuk mempekerjakan tenaga kerja (*excess demand for labor*), yaitu pada tingkat upah tertentu, untuk suatu pekerjaan tertentu jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan lebih banyak dari jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja.

Pengangguran sebagai masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis [19]. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Pendapat lain mengenai pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*) [20]. Secara umum, pengangguran dikatakan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut [21]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pada saat berada dalam Keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya sehingga Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak

bekerja secara optimal [3]. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam [22] yaitu: 1).Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal, pengangguran terbuka yang terdiri dari orang yang mencari pekerjaan, orang yang mempersiapkan usaha, orang yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), dan orang yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 2).Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal (35 jam selama seminggu). Setengah menganggur terdiri dari: Setengah pengangguran terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (35 Jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Setengah pengangguran sukarela, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (35 Jam seminggu) dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu atau *part time worker*). 3).Pengangguran tidak kentara atau pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu namun dilihat dari produktivitas kerja sebetulnya mereka adalah penganggur.

Dilihat dari penyebabnya pengangguran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian: a).Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian.penduduk tidak mempunyai keahlian untuk memasuki sektor baru sehingga mereka menganggur. b).Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian sehingga berkurangnya permintaan masyarakat (*agregat demand*). c).Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. d).Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern yang menggantikan tenaga kerja manusia

Pengangguran terdidik hanya terjadi selama lulusan mengalami masa tunggu (*job search periode*) yang dikenal sebagai pengangguran friksional. Lama masa tunggu itu juga bervariasi menurut tingkat pendidikan. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi pendidikan angkatan kerja semakin lama masa tunggunya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas seseorang (tenaga kerja) maka peluang untuk bekerja

semakin luas. Pada umumnya untuk bekerja di bidang perkotaan (*white collar*) atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang (tenaga kerja) berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien [23].

Pengangguran terdidik merupakan angkatan kerja berpendidikan menengah keatas dan tidak bekerja, jika didasarkan pada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, maka golongan terdidik adalah golongan dimana telah menempuh pendidikan dasar dan kemudian memutuskan untuk menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi [24]. Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap kedalam lapangan kerja yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja bukan pencipta kerja [25]. Di sejumlah negara berkembang, terjadi hubungan positif antara pengangguran dan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Penyebab dari situasi ini adalah bahwa mereka yang tidak terdidik tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka kalau tidak bekerja, sehingga mereka mau melakukan apa saja untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, meskipun hanya bekerja secara terbatas. Sedangkan bagi yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, mereka hanya mau bekerja kalau pekerjaan itu memberi uang, status, atau kepuasan yang relatif tinggi [5].

Pengangguran terdidik yang merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para penganggur terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Pengangguran terdidik sangat berkaitan dengan masalah pendidikan di Negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang sedang berkembang, pendidikan dipersiapkan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan. Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jurusan mereka, sehingga para lulusan tersebut tidak terserap kedalam lapangan kerja yang ada. Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja bukan

pencipta kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

- 1) besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
- 2) struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.
- 3) Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.
- 4) penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.
- 5) Upah Kerja. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Adanya kebijakan pemerintah dalam penetapan upah seperti dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Adanya perbaikan upah berarti akan ada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong pengusaha untuk menambah produksi yang secara otomatis menambah karyawan [26].

Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh), peningkatan upah mengakibatkan efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi dan Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak waktu luangnya untuk berekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya jenis barang yang ingin dibeli. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam

memberi upah pekerjanya Dalam UU Pengupahan No 78 Tahun 2015, disebutkan ada empat jenis upah minimum:

- 1) Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- 2) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral artinya kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
- 3) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten/kota.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional [2]. Upah juga mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada tingginya pengangguran [27].

Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran [28]

Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan

pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.
- 2) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- 3) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang.

Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya: Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian; Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan; dan Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

KESIMPULAN

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah diantaranya masalah tenaga kerja yang sangat kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami menjadi besar karena menyangkut ribuan bahkan jutaan jiwa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja yang terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Diharapkan Pemerintah berkomitmen untuk memperbanyak pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak untuk mengurangi angka pengangguran yang berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Hendaknya lembaga pendidikan juga memberikan keterampilan berwirausaha kepada anak didik sehingga mereka setelah lulus memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan usaha bagi dirinya sendiri. Perlu adanya Lembaga pelatihan dan Keterampilan kerja di daerah

untuk remaja yang baru selesai sekolah untuk meningkatkan keterampilan kerja dan menyalurkannya pada lapangan kerja yang membutuhkan sesuai keterampilan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Didik Susetyo, M.Si, dan Ibu Dr. Rosmiati Khodijah, M.Si, serta Ibu Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan Support.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. P. N. Yanti and I. K. Sudibia, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Penduduk Lanjut Usia di Kelurahan Sesetan Kota Denpasar," *Jur. Ekon. Pembang. Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Udayana*, vol. 8, no. 1, pp. 118-147, 2019.
- [2] M. Sholeh, "Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia," *J. Ekon. dan Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 62-75, 2007, doi: 10.21831/jep.v4i1.618.
- [3] S. Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [4] B. Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [5] M. P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 8th ed. Jakarta: Erlangga, 2004.
- [6] M. Nur *et al.*, "Pengangguran Terdidik di Provinsi Sulawesi Selatan," *Analisis*, vol. 5, no. 1, pp. 29-33, 2016.
- [7] "Badan Pusat Statistik." <https://bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3> (accessed Oct. 02, 2019).
- [8] M. Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- [9] G. Mankiw, *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. Jakarta: Erlangga, 2000.
- [10] A. Farid, "Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007," *Anal. Tingkat Pengangguran di Indones. Tahun 1980-2007*, pp. 1-31, 2010.
- [11] "Badan Pusat Statistik." <https://bps.go.id/subject/19/upah--buruh.html#subjekViewTab3> (accessed Jun. 23, 2020).
- [12] Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- [13] S. K. Widhaningrat, *Dasar-Dasar Demografi: Angkatan Kerja*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [14] *UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003*. .
- [15] BPS, "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2007," no. August, 2007.
- [16] S. Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2009.

- [17] G. J. Borjas, "Labor Economics," in *The Heart of Teaching Economics*, SIXTH EDIT., J. M. ROERIG-BLONG and D. C. BRUFLOADT, Eds. United States: DOUGLAS REINER, 2013, p. 576.
- [18] G. J. Borjas, *Labor Economics (Seven)*, 7th ed. United States: The MacGrow-Hill Companies, 2016.
- [19] G. Mankiw, *Makro Ekonomi*, 6th ed. Jakarta: Erlangga, 2006.
- [20] M. Nanga, "Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan," *Jakarta Rajawali Pers*, 2001.
- [21] M. Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- [22] R. Probosiwi, "Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan," *Balai Besar Penelit. dan Pengemb. Pelayanan Kesejaht. Sos.*, no. 1, pp. 89-100, 2016.
- [23] R. F. Putri, "Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik," *Econ. Dev. Anal. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 175-181, 2015, doi: 10.15294/edaj.v4i2.14821.
- [24] M. Mada and K. Ashar, "Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik Di Indonesia," *J. Ilmu Ekon. dan Pembang.*, vol. 15, no. 1, pp. 50-76, 2015, doi: <https://doi.org/10.20961/jiep.v15i1.9894>.
- [25] A. K. Sari, "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat," vol. 1 No 02, pp. 1-8, 2013, [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/122/109>.
- [26] N. U. K. Annisa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Provinsi Lampung," vol. 7, no. 2, pp. 45-56, 2015, [Online]. Available: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8274>.
- [27] N. R. F. Sari, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014," *Ekon. Pembang.*, vol. 14, no. 9, pp. 71-84, 2016, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [28] N. L. Aruan and D. Sriyono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Tahun 1985-2011," *Modus*, vol. 26, no. 2, p. 173, 2016, doi: 10.24002/modus.v26i2.587.